

DINAMIKA HUBUNGAN IKHWANUL MUSLIMIN SURIAH DAN REZIM PEMERINTAHAN HAFEZ AL ASSAD TAHUN 1979-1982

Idiyansa¹, Safira^{2*}, Rismilga Ariska³, Lutfiana⁴, Ai Ling⁵

¹⁻⁵ Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
Surel: safira22ptk@gmail.com

Abstract

The Muslim Brotherhood the largest Islamic organization in the Middle East region and has even expanded to almost all countries. In several countries, the Muslim Brotherhood is seen as a political opponent by the ruling regime. One of them is in Syria, the entry of the Muslim Brotherhood into Syria had a significant impact on the government at that time led by Hafez Al-Assad. The Muslim Brotherhood can be a strong opposition against the government. This paper is presented to answer how the Dynamics of the Syrian Muslim Brotherhood Relations and the Hafez Al Assad Government Regime from 1979 to 1982. The dynamics of the relationship between the Muslim Brotherhood and the Hafez Regime experienced ups and downs and continued to influence each other. This paper tries to analyze the influence of the Syrian Muslim Brotherhood's presence and look at the policies carried out during the reign of Hafez Al Assad to overcome the problem of terrorism in Syria. Through a qualitative approach with descriptive methods, the source of the data in this paper comes from a literature study by examining books, journals, reports, research, and data from the internet with reliable sources that are used to explain the phenomenon further. The results of this paper show. First, the four-pillar policy made by the Hafez government received a lot of opposition from opposition groups, especially the Muslim Brotherhood, resulting in rebellions and attacks, which then affected the power of government. Therefore the government regime had to securitize to maintain its power and achieve its political goals. Second, there are several counter-terrorism policies carried out by the Hafez government regime through three strategies that are implemented to overcome the problem of terrorism in Syria.

Keywords: *Hafez Al Assad Regime; Muslim Brotherhood; Syria.*

Abstrak

Ikhwanul Muslimin terkenal sebagai organisasi Islam terbesar yang berada di kawasan Timur Tengah dan bahkan sudah meluas hampir ke seluruh negara. Di sejumlah negara, Ikhwanul Muslimin dipandang sebagai lawan politik oleh rezim yang berkuasa. Salah satunya adalah di Suriah, masuknya Ikhwanul Muslimin ke Suriah membawa dampak signifikan bagi pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Hafez Al – Assad. Ikhwanul Muslimin mampu menjadi oposisi kuat dalam melawan pemerintah. Tulisan ini disajikan guna menjawab pertanyaan bagaimana Dinamika Hubungan Ikhwanul Muslimin Suriah dan Rezim Pemerintahan Hafez Al Assad pada tahun 1979 hingga 1982. Dinamika hubungan yang terjadi antara Ikhwanul Muslimin dan Rezim Hafez mengalami pasang surut dan terus mempengaruhi satu sama lain. Tulisan ini mencoba menganalisa pengaruh keberadaan Ikhwanul Muslimin Suriah serta melihat kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Hafez Al Assad untuk mengatasi masalah terorisme di Suriah. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sumber data dalam tulisan ini berasal dari studi pustaka dengan telaah buku, jurnal, laporan, penelitian, serta data dari internet dengan sumber yang terpercaya yang digunakan untuk menjelaskan fenomena lebih jauh. Hasil dari tulisan ini memperlihatkan. Pertama, Kebijakan empat pilar yang dibuat oleh pemerintahan Hafez mendapat banyak penolakan dari kelompok oposisi khususnya ikhwanul muslimin, sehingga terjadi pemberontakan dan serangan yang kemudian mempengaruhi kekuasaan pemerintahan, maka dari itu rezim pemerintahan hafez melakukan sekuritisasi untuk mempertahankan kekuasaannya dan mencapai tujuan politiknya. Kedua, Terdapat beberapa kebijakan counter terrorism yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Hafez melalui tiga strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah terorisme di Suriah.

Kata Kunci: Ikhwanul Muslimin; Rezim Hafez Al Assad; Suriah.

Diajukan: 10 Mei 2020

Direvisi: 20 Juni 2020

Diterima: 30 Juni 2020

Sitasi: Idiyansa et al. (2020). Dinamika Hubungan Ikhwanul Muslimin Suriah dan Rezim Pemerintahan Hafez Al Assad Tahun 1979-1982. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25 (1), 46-60.

Pendahuluan

Dalam perkembangannya, aktor dalam hubungan internasional sudah semakin beragam misalnya organisasi internasional. Berbagai organisasi muncul baik dari pemerintahan maupun swasta yang memiliki tujuannya masing-masing untuk mencapai kepentingannya. Salah satu organisasi islam yang paling berpengaruh yaitu organisasi Ikhwanul Muslimin. Al-Ikhwan al-Muslimun (selanjutnya disebut IM) merupakan gerakan Islamis dunia yang menyediakan model aktivisme berbasis agama bagi gerakan yang meniru atau menjadi cabangnya yang seiring berkembangnya zaman organisasi IM ini bergerak menjadi gerakan transnasional kelompok politik yang dipengaruhi oleh pemikiran islam kontemporer, melalui struktur dan asosiasi (Aiqani, 2018).

Kemudian salah satu kajian dalam hubungan internasional yang berkembang pesat saat ini, yaitu kajian mengenai terorisme. Terorisme yang muncul sejak adanya kejadian 9/11 menjadi sangat diperhatikan oleh kalangan pemerintah dunia. Menurut T. P. Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) yang menjelaskan bahwa terorisme didefinisikan sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra ketat, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan (Hamzah, 2013). Jadi terorisme merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengancam keamanan suatu negara yang akan mempengaruhi kegiatan politik suatu negara.

Ikhwanul Muslimin terkenal sebagai organisasi Islam terbesar yang berada di kawasan Timur Tengah dan bahkan sudah meluas hampir ke seluruh negara. Awalnya IM hanya sebagai organisasi Islam yang mengajari Islam secara benar menurut ajarannya, namun seiring berjalannya waktu organisasi tersebut mengarah ke arah politik dengan alasan Jihad untuk menjatuhkan pemerintahan yang otoriter seperti Irak dan Suriah. Di Suriah organisasi tersebut disebut sebagai Ikhwanul Muslimin Suriah (IMS), dimana IMS menganut ajaran Islam Sunni yang berbanding terbalik dengan sistem pemerintahan yaitu Islam Syiah. Maka dari itu IMS melakukan jihad dengan cara memberontak dan akhirnya banyak menimbulkan korban jiwa sehingga dianggap sebagai ancaman negara Suriah dan IMS di anggap sebagai terorisme.

Sekuritisasi dapat dikatakan sebagai bentuk ekstrim dari politisasi, dimana pengambil kebijakan mempunyai otoritas untuk memilih apakah sebuah isu ditangani atau tidak ditangani dengan kebijakan politik atau yang paling ekstrim dinyatakan sebagai sebuah ancaman keamanan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah di luar prosedur politik normal. Umumnya tindakan-tindakan teror dianggap sebagai ancaman nyata (*existential threat*) sehingga sumber daya yang diperlukan untuk mengatasinya sangat besar dan jauh lebih besar (Yulianti, 2017). Barry Buzan et al. (1998) merupakan orang yang pertama kali menyampaikan mengenai teori sekuritisasi yang menjelaskan fenomena politik dimana pejabat negara memilih sebuah isu, lalu kemudian dengan serangkaian pidato atau pernyataan (*speech act*) isu tersebut dibawa ke ranah keamanan dan diidentifikasi sebagai sebuah ancaman keamanan sehingga negara berhak atau dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan militer dalam mengatasi isu tersebut (Yulianti 2017).

Mengutip dari Sartika (2011) dalam tulisannya yang menyatakan pandangan dari Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde yang dikenal sebagai kelompok Copenhagen School, sekuritisasi adalah “... *the move that takes ... beyond the established rules of the game and frames the issue as either a special kind of politics or as above politics*”. Secara sederhana istilah sekuritisasi dapat dipahami sebagai proses dimana suatu isu dipahami sebagai sebuah masalah keamanan. Pada dasarnya sekuritisasi merupakan suatu cara pandang dalam mengetahui atau memperlakukan isu yang berkembang sebagai suatu bahaya yang luar biasa yang diikuti dengan ancaman tingkat tinggi diluar batas kewajaran yang ada (Soesilowati, 2011).

Pendekatan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam prakteknya dapat dikaitkan dengan upaya atau kebijakan yang menjadikan suatu permasalahan yang sebenarnya hanya memerlukan penanganan yang biasa menjadi sebuah isu yang sangat mengancam keamanan nasional sehingga perlu tindakan khusus. Tindakan-tindakan yang bersifat militeristik atau di luar kewajaran lebih diutamakan, contohnya dalam kasus pemberantasan terorisme yang mengedepankan upaya yang bersifat militeristik (Soesilowati, 2011). Jadi, Jika sebuah kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan sekuritisasi maka pemerintah akan memperkenalkan atau menganggap sebuah isu yang seharusnya merupakan suatu permasalahan yang tergolong biasa (tidak memerlukan tindakan militer dan represif) menjadi sebuah isu yang mengancam keselamatan masyarakat dan keberlangsungan negara. Dengan adanya anggapan seperti ini maka tindakan militer, represif, diskriminatif atau pengamanan ekstra merupakan tindakan yang paling sesuai dan mendesak untuk mengatasi permasalahan yang ada (Soesilowati, 2011).

Terdapat beberapa prasyarat konsep atau komponen sekuritisasi yang harus ada dalam mempelajari sekuritisasi sebagai proses, yang pertama mengetahui siapa aktor atau pelaku tindakan sekuritisasi (*securitizing actors*). Kedua, siapa yang terancam dan perlu dilindungi (*referent object*). Ketiga, apa ancaman yang diidentifikasi oleh aktor (*existential threat*). Keempat, siapa *audience* (publik yang menjadi target *speech act*, atau dipersuasi, agar percaya bahwa ada ancaman). Kelima, apa perkataan yang disampaikan oleh *securitizing actors* (*speech act*). Serta yang keenam, mengapa sekuritisasi dilakukan dan bagaimana hasil dari kebijakan tersebut (Yulianti, 2017). Berangkat dari komponen sekuritisasi diatas, maka pendekatan sekuritisasi ini dapat membantu peneliti dalam menganalisis munculnya isu keamanan baik itu bersifat tradisional maupun konvensional. Isu yang dikembangkan berangkat dari isu biasa yang tidak berkaitan dengan kebijakan politik menjadi isu penting dengan membutuhkan kebijakan politik.

Sehingga pendekatan sekuritisasi sangat relevan digunakan dalam menganalisis fenomena yang penulis angkat dalam tulisan ini. Maka dari itu, tulisan ini akan menganalisa bagaimana dinamika hubungan Ikhwanul Muslimin Suriah terhadap rezim pemerintah Hafez Al-Assad dari tahun 1979 hingga 1982 dengan menggunakan prasyarat konsep atau komponen sekuritisasi untuk melihat bagaimana proses sekuritisasi dilakukan.

Terdapat beberapa pandangan yang berbeda dari berbagai ahli terorisme dalam mendefinisikan arti dari *counter terrorism*. Menurut Sandler, *counter terrorism* merupakan sebuah tindakan pemerintah untuk menghalangi serangan teroris dan

mengurangi atau membatasi konsekuensi dari serangan teroris. Selanjutnya menurut pandangan Metan *counter terrorism* adalah sebuah intervensi yang dilakukan negara untuk menanggapi tindakan teroris. Sedangkan menurut Omilicheva *counter terrorism* adalah seluruh kebijakan pemerintah termasuk didalamnya kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri yang dirancang untuk mengekang teroris dan memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan teroris, serta menegakkan ketertiban sosial dalam masyarakat. Jadi, secara sederhana *counter terrorism* dapat diartikan sebagai tindakan melawan terorisme atau upaya menggagalkan tindakan terorisme, yang lebih menekankan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ketika serangan teroris telah terjadi. Pada dasarnya di dalam kontra terorisme terdapat pula upaya defensif maupun offensif (Rahanyamtel, 2017).

Berdasarkan pandangan dari Hewitt dan Omilicheva yang menyatakan bahwa dalam menetapkan sebuah strategi *counter terrorism* harus terkait pada persepsi terorisme itu sendiri, harus diketahui siapa terorismenya dan bagaimana karakteristiknya serta persepsi mengenai penyebab munculnya terorisme. Apabila pemerintah telah mengetahui faktor penyebab munculnya kelompok terorisme maka tindakan *counter terrorism* dapat difokuskan pada upaya untuk menuntaskan penyebab tersebut. Faktor politik, ekonomi, maupun agama merupakan beberapa faktor penyebab munculnya kelompok terorisme, maka dari itu dibutuhkan tindakan kontra terorisme yang dapat mencakup hal-hal tersebut. Setiap negara yang menghadapi ancaman terorisme memiliki kebijakan kontra terorisme yang berbeda-beda, perbedaan ini mencakup jangkauan, tujuan, target dari teroris dan beberapa indikator lainnya yang berbeda-beda di setiap negara. Oleh sebab itu strategi dalam kontra terorisme juga tidak dapat ditentukan secara pasti, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor kemunculan terorisme yang tidak sama (Rahanyamtel, 2017).

Beberapa kebijakan *counter terrorism* diantaranya, peningkatan atau modernisasi teknologi pencegah terjadinya kejahatan, penguatan terhadap target atau berusaha memperkuat masyarakat supaya tidak menjadi bagian dari teroris, melakukan peningkatan personil keamanan melalui militer, memperkuat lembaga-lembaga yang berhubungan dengan terorisme dan memberikan atau memperbaharui hukum agar sanksi yang diterima para pelaku teroris lebih berat dan memberikan efek jera. Setiap tindakan *counter terrorism* diimplementasikan oleh sebuah negara dalam kebijakan domestik maupun kebijakan eksternal. Kebijakan domestik dapat berupa analisis intelijen, kekuatan militer, manajemen media dan penguatan hukum. Sedangkan kebijakan eksternal dapat meliputi hubungan diplomatik dengan negara lain dalam menghadapi terorisme serta inisiatif internasional ataupun kerjasama internasional (Rahanyamtel, 2017). Dalam konteks pembahasan ini, *counter terrorism* digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah Suriah pada rezim pemerintahan Hafez Al Assad dalam menghadapi ancaman kelompok terorisme Ikhwanul Muslimin yang berada di wilayah Suriah. *Counter terrorism* yang dilakukan oleh pemerintah Suriah pada saat itu diimplementasikan ke dalam kebijakan domestik yang bertujuan untuk menjaga keamanan Suriah dari ancaman Ikhwanul Muslimin yang semakin meluas.

Maka dari itu, penulis akan meneliti mengenai dinamika hubungan organisasi islam (Ikhwanul Muslimin) dan Rezim pemerintahan Hafez Al- Assad sebagai suatu fenomena

interaksi antar organisasi dan pemerintah, yang dalam hal ini dikatakan sebagai bagian dari gerakan terorisme. Jenis terorisme yang penulis gunakan untuk menganalisis fenomena ini adalah jenis terorisme *Insurrectionary anarchist terrorism*. *Insurrectionary anarchist terrorism* adalah jenis terorisme yang menyebabkan adanya gerakan anarkis yang lebih menekan kepada pemberontakan. Hal ini sejalan dengan tema yang penulis gunakan dimana adanya aksi pemberontakan oleh kelompok terorisme yaitu Ikhwanul Muslimin terhadap pemerintahan Hafez Al Assad di Suriah. Sehingga disini penulis akan meneliti mengenai bagaimana dinamika hubungan Ikhwanul Muslimin dan rezim pemerintahan Hafez Al Assad pada tahun 1979-1982.

Metode penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur. Beberapa sumber yang dijadikan acuan adalah buku, artikel jurnal, serta artikel online. Analisis data dilakukan sejalan dengan proses pengumpulan data dengan dipandu teori sekuritisasi dan *counter-terrorism*.

Hasil dan Diskusi

Sejarah Masuknya Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin (IM) merupakan sebuah gerakan yang didirikan oleh Hasan Al Banna dan keenam tokoh lainnya yaitu, Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi. Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah Mesir pada bulan maret tahun 1928 (Khaliki, 2012). Lahirnya gerakan Ikhwanul Muslimin sendiri dilandasi oleh sebuah perasaan yang sangat memilukan bagi masyarakat Mesir yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah yang berpusat di Turki dan penjajahan yang terjadi di negeri muslim serta turunnya moral umat islam. Adapun menurut Yahya Armajani, ada tiga faktor yang mengakibatkan munculnya sebuah kelompok atau organisasi yang memberikan pengaruh besar sampai usainya perang dunia kedua.

Yang pertama, adanya rasa takut dan ketidaknyamanan dalam diri setiap orang mesir karena pemimpinnya merupakan non muslim serta dikarenakan adanya kehadiran orang-orang Inggris (British). Yang kedua adalah sering terjadinya sekularisasi yaitu hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Sebagian muslim memandang bahwa sekularisasi ini menjadi ancaman terhadap orang-orang islam yang mana jika sekularisasi ini diterapkan nilai-nilai islam akan terkikis dan digantikannya dengan nilai-nilai barat. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan ajaran islam. Serta yang ketiga yaitu orang-orang Mesir beranggapan bahwa akan adanya ancaman dari Turki yang nantinya ditakutkan akan mengambil alih Mesir dari masyarakat Mesir sendiri (Sattar, 1995). Oleh karena itu tiga hal tersebutlah yang menjadi alasan masyarakat Mesir untuk membangun sebuah organisasi persaudaraan muslim atau yang biasa disebut sebagai Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok militan yang mempercayai sufisiensi dan supremasi kekokohan syariah agama islam. Ikhwanul Muslimin kembali membangkitkan prinsip jihad yang menentang sekularisme. Disisi lain

Ikhwanul Muslimin masih mau menerima atau menghargai sebagian dari metode, ilmu, dan budaya barat tertentu karena Ikhwanul Muslimin ingin menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai rujukan utama dalam bernegara. Struktur administrasi Ikhwanul Muslimin sendiri disusun pada tahun 1932 dan di tahun yang sama juga Ikhwanul Muslimin membuka cabang di Suez, Abu Soweir dan Al- Mahmoudiya. Pada tahun 1933, Ikhwanul Muslimin di bawah pimpinan Muhibuddin Khatib berhasil menerbitkan majalah mingguan (Chairil, 2014).

Di sejumlah negara, Ikhwanul Muslimin dipandang sebagai lawan politik oleh rezim yang berkuasa. Salah satunya adalah di Suriah. Masuknya Ikhwanul Muslimin ke Suriah membawa dampak signifikan bagi pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Hafez Al – Assad. Ikhwanul Muslimin mampu menjadi oposisi kuat yang melawan pemerintah karena Ikhwanul Muslimin merasa bahwa pemerintah tidak berpegang teguh pada agama dan menyalahi aturan serta norma agama islam yang seharusnya diterapkan di negara islam seperti Suriah.

Dalam penyebarannya Ikhwanul Muslimin selalu berpegang teguh pada prinsip yang sudah ada yaitu Pertama, bersih aqidah dan bersungguh sungguh dalam menaati Allah SWT, sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah. Kedua, cinta karena Allah dan berpegang teguh pada persatuan Islam. Ketiga, melaksanakan adab-adab islam yang lurus mendidik pribadi agar mengenal Allah dan lebih mengutamakan akhirat dari pada dunia. Keempat, memegang teguh prinsip dan memegang janji dengan tetap meyakini bahwa prinsip yang paling sakral adalah agama. Kelima, bersungguh-sungguh dalam menyebarkan dakwah islam di tengah-tengah lapisan masyarakat demi menggapai ridho Allah SWT. Keenam, cinta pada kebenaran dan kebaikan melebihi kecintaan kepada segala sesuatu yang ada di dunia (Misbah, 2015). Prinsip-prinsip inilah yang menjadi pegangan bagi setiap anggota untuk tetap semangat melawan hal-hal yang dirasa jauh dari agama seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Hafez Al-Assad.

Kebijakan Rezim Hafez Al Assad

Pemerintahan Hafez Al Assad terkenal dengan sistem pemerintahan yang anarkis, dimana Hafez Al Assad membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menekan masyarakat sipilnya karena, Hafez Al Assad hanya akan membuat kebijakan yang akan menguntungkan bagi kaumnya yaitu kaum Syiah. Keinginan Hafez Al Assad untuk mengubah negara Suriah yang nasionalisme bebas bersosialisme menjadi negara yang besistem Presidensial mutlak yang dikukuhkan oleh Konstitusi permanen 1973 (Inggita, 2018). Bidang-bidang politik, ekonomi, dan sosial terus dilakukan perubahan oleh sistem yang dibuat Hafez Al Assad. Presiden yang dikenal sangat anti terhadap Amerika Serikat dan Israel ini, merupakan salah satu Presiden yang mendukung kemerdekaan Palestina, dan kerana memiliki sikap yang lantang dan menentang, Hafez Al Assad ini sangat disegani oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Hafez Al Assad.

Kebijakan yang dibuat oleh Hafez Al Assad tidak hanya dapat membuat AS dan sekutunya merasa takut, tetapi juga terdapat kebijakan yang membuat masyarakat sipilnya merasa dirugikan terutama kaum yang tidak sejalan dengannya seperti kaum Islam Sunni.

Keinginan Hafez Al Assad untuk menjadikan negara yang berlandaskan Islam Syiah banyak ditentang oleh masyarakat sipil negara Suriah yang dominan Islam Sunni. Salah satu organisasi yang paling ditakuti dan terkenal di Timur Tengah yaitu Ikhwanul Muslimin (IM) dan di Suriah disebut sebagai Ikhwanul Muslimin Suriah (IMS). Dimana saat itu kebijakan yang dibuat oleh Hafez Al Assad sangat ditentang oleh IMS tersebut karena merugikan anggota dan masyarakat yang tergolong kaum Islam Sunni. IMS menjadi pendukung utama serta pemimpin bagi masyarakat Islam Sunni untuk mendapatkan keadilan terhadap kaumnya.

Sejak masa kepemimpinannya Hafez Al Assad sangat kuat hubungannya antara politik dan militer. Dimana Hafez Al Assad merupakan salah satu anggota partai Ba'ath. Dimana militer selalu mendukung kekuasaan partai Ba'ath. Al-Bitar yang merupakan salah satu pendiri partai Ba'ath berhasil menarik dukungan kelompok Syi'ah Alawiyyah melalui kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan kelompok minoritas (Fahry, 2015). Sejak saat itu, Syi'ah Alawiyah menjadi kelompok minoritas yang berhasil menguasai institusi dan lembaga pemerintahan dan setelah terpilihnya Hafez Al Assad menjadi presiden kedudukan mereka semakin tinggi dan berkuasa.

Setelah menduduki pemerintahan di Suriah, Hafez Al Assad membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi kaum Alawiyyah Islam Syiah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut menimbulkan berbagai macam tekanan dan pemberontakan bagi Islam Sunni yang merupakan penduduk mayoritas Suriah. Sejak saat ini timbullah oposisi-oposisi yang melawan pemerintahan, yang didukung oleh berbagai organisasi Islam Syiah salah satunya Ikhwanul Muslimin Suriah (IMS). Kebijakan yang dibuat didukung pula oleh militer, hal itulah yang kemudian membuat kedudukan pemerintahan ini menjadi kuat karena militer digunakan untuk melawan oposisi yang ingin menentang kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Hafez Al Assad, kolaborasi antara partai Ba'ath dan militer memang sangatlah kuat. Hal inipun didukung dengan adanya rezim Assad yang tetap menggunakan atau mensinergiskan yang disebut sebagai kebijakan empat pilar. Kebijakan empat pilar tersebut telah menimbulkan pemberontakan dari pihak oposisi yaitu Ikhwanul Muslimin Suriah. Adapun pilar yang pertama yaitu mempersatukan kelompok minoritas (Fahry, 2015), keinginan besar partai Ba'ath yaitu dengan memperkuat ikatan kaum minoritas yang ada di Suriah. Melalui Hafez Al Assad, kelompok minoritas tersebut dapat menduduki kedudukan pemerintahan tanpa melalui pemilu tetapi di pilih langsung serta kelompok minoritas yang dulunya menjadi kaum yang didiskriminasi oleh kaum mayoritas serta tinggal di tempat sudut-sudut negara Suriah kini telah dapat menduduki wilayah kota. Kaum minoritas tersebut ialah kaum atau etnis Presiden Hafez Al Assad yaitu Kaum Alawwiyah yang beraliran Islam Syiah.

Kemudian pilar yang kedua yaitu mengontrol secara penuh aparatur militer-intelijen (Fahry, 2015). Partai Ba'ath merupakan partai yang memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan militer dan intelijen. Maka dari itu pemerintahan memerlukan masukan atau militer memiliki peran penting dalam pemerintahan. Hal ini terjadi karena Suriah sangat bermusuhan dengan Amerika Serikat dan sekutunya, jadi pemerintah mendahului kemiliteran untuk menjaga keamanan negaranya, bahkan apabila ada pria

diatas 18 tahun yang tidak kuliah diwajibkan mengikuti sekolah militer. Serta intilijen negara yang selalu di utus oleh pemerintah untuk mengintai para oposisi lawan baik dalam maupun luar negeri.

Selanjutnya pilar yang ketiga, yaitu memonopoli kepemimpinan partai Ba'ath (Fahry, 2015), yang dimaksud dengan memonopoli partai Ba'ath adalah menggunakan sistem satu partai, yang artinya parai Ba'ath memiliki peran yang cukup baik untuk menduduki kursi pemerintahan. Kemudian pilar yang keempat yaitu meneguhkan kembali UU darurat yang telah di tetapkan pada tahun 1962 (Fahry, 2015), dimana pilar yang terakhir inilah yang banyak ditentang oleh oposisi lawan karena isi UU tersebut menyiratkan bahwa hampir tidak adanya kekuasaan tanpa batas terhadap partai Ba'ath. Artinya partai Ba'ath dapat semena-mena melakukan apapun yang diinginkan seperti menggunakan uang negara untuk keperluan pribadi serta dengan mudahnya melakukan pemberontakan dan menyebabkan banyaknya korban masyarakat sipil apabila ada oposisi yang mencoba untuk melakukan perlawanan agar dapat menjatuhkan Hafez Al Assad dan para anggota pemerintahannya.

Keempat pilar tersebut mendapatkan gejolak atau penolakan dari oposisi lawan, terutama pada pilar yang terakhir. Karena dengan memberikan kekuasaan tanpa batas ke partai Ba'ath berarti akan mengecilkan kemungkinan aliran Islam Sunni dapat menduduki pemerintah lagi. Jika dilihat dengan menggunakan teori sekuritisasi yang merupakan teori yang penulis gunakan untuk menganalisa fenomena ini, setelah mengumumkan untuk menerapkan kebijakan empat pilar yang dibuat oleh rezim pemerintahan Hafez Al Assad yang kemudian merupakan *speech act* yang disampaikan oleh securitizing actors yaitu pemerintahan Hafez Al Assad, yang kemudian menyebabkan timbulnya beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin Suriah (IMS) di beberapa kota yang ada di Suriah.

Pemberontakan yang timbul kemudian diidentifikasi sebagai ancaman atau *existential threat* bagi pemerintahan Hafez Al Assad serta masyarakat sipil yang terkenal dampak dari pemberontakan tersebut. Di lain sisi masyarakat sipil juga harus dilindungi dari segala ancaman yang ada yang diakibatkan oleh kelompok teroris ini, sebab masyarakat sipil merupakan *referent object* atau kelompok yang harus dilindungi dari ancaman yang ada selain pemerintah. Selain itu publik termasuk didalamnya masyarakat sipil dijadikan sebagai target atau pihak yang dipersuasi agar percaya bahwa terjadi ancaman, terutama masyarakat sipil suriah yang beraliran Syiah yang mendukung pemerintah Hafez.

Alasan mengapa pemerintahan Hafez Al Assad melakukan sekuritisasi adalah karena pemerintahan Hafez ingin mempertahankan kekuasaan dan mencapai tujuan politiknya melalui penerapan kebijakan empat pilar serta mengamankan dan melindungi negara dan masyarakatnya dari pemberontakan kelompok terorisme yang terjadi akibat penolakan terhadap kebijakan yang dibuat. Terutama kelompok terorisme Ikhwanul Muslimin Suriah merupakan organisasi Islam Sunni yang dianggap sebagai salah satu kelompok terorisme yang ingin menjatuhkan pemerintahan Hafez Al Assad.

Pemberontakan IMS (Ikhwanul Muslimin Suriah) dan Upaya Pemerintah

Pada masa pemerintahan Hafez Al – Assad banyak hal yang terjadi dengan sistem pemerintahan yang atur pada saat itu. Hafez Al – Assad yang menjabat sejak 1970 hingga tahun 2000 membawa banyak sekali perubahan sekaligus pergolakan dari masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pertentangan kebijakan yang dikeluarkan pada saat itu. Tekad kuat Hafez ingin mendirikan Suriah sebagai negara sekuler ditentang oleh masyarakatnya yang beraliran Sunni dan kelompok islam lainnya yang dalam hal ini ialah IMS (Ikhwanul Muslimin Suriah). IMS dengan tegas menyatakan oposisi pada pemerintahan Hafez, hal ini tentu saja menjadi ancaman tersendiri bagi Hafez mengingat IMS cukup kuat dan tidak bisa diremehkan untuk menurunkan kekuasaan Hafez pada saat itu.

Walau begitu, jika dilihat sebelum pemerintahan Hafez pada Maret 1963 menjadi retakan pertama antara IMS dan pembentukan Suriah. Hal ini dikarenakan adanya gerakan setelah kudeta militer dan membawa Baath menuju kekuasaan di Suriah. Baath sendiri merupakan partai yang berideologi sekuler-nasionalis yang mendukung adanya gerakan-gerakan sekuler yang dianggap dapat membalikkan piramida sosial Suriah. Reformasi ini yang kemudian melukai masyarakat dan elit Sunni yang merasa tidak perlu adanya sekularisasi di negara islam seperti Suriah. Para masyarakat dan elit Sunni ini juga merupakan pendukung dari IMS. Hal lain yang dilakukan oleh Baath dengan gaya diktatornya dan didukung oleh kaum minoritas termasuk di dalamnya kaum Alawit mencoba melakukan banyak perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya yang dirasa menjadi penghambat majunya perkembangan negara Suriah. Karena hal inilah, para elit Sunni yang didukung oleh pemangku agama dan juga IMS merasa perlu untuk melawan dan mengambil sikap dalam menghadapi rezim Suriah pada saat itu. Bentrokanpun mulai terjadi antara IMS dan pemerintah sehingga pada tahun 1964 membuat beberapa kelompok yang melawan seperti at-Attar diasingkan. Namun demikian ketegangan tidak kunjung mereda (Blanga, 2017).

Pada tahun 1970 hal yang paling tak diinginkan oleh IMS dan pendukungnya terjadi, perwakilan dari partai Baath maju menjadi pemimpin Suriah dengan periode yang tak ditentukan. Ia adalah Hafez Al Assad yang ditunjuk dan didukung oleh elit Baath untuk maju sebagai Presiden Suriah dan melanjutkan misi mereka menjadikan Suriah negara maju versi mereka. Sudah tidak diragukan lagi kebijakan yang dilakukan oleh Hafez banyak kemudian menyudutkan muslim Sunni dan IMS hingga mendiskriminasikan kaum Sunni, misalnya saja mengganti pejabat militer dari kalangan Sunni diganti dengan kaum Alawit yang menjadi kaum pendukung Hafez dan Baath (Inggita, 2018).

Pada tahun 1976, terjadi banyak sekali serangan terhadap pemimpin rezim seperti pejabat pertain dan perwira militer. Sehingga menandai awal dari Pemberontakan Islam atau Revolusi Islam di Suriah. Dari sekian banyak serangan ini terdapat serangan yang tidak diklaim dan menambah banyaknya kelompok Islam radikal yang menjadi kekuatan dibalik serangan tersebut. IMS pada saat itupun sulit untuk diketahui dengan jelas keberadaannya. Hingga pada akhir tahun 1970an IMS dan kelompok mujahidin lainnya mulai bekerja sama dengan lebih erat. Hingga pada tahun 1978 mereka mulai bertemu di

Beirut dan setuju untuk membentuk komando militer bersama yang pada saat itu dipimpin oleh Marwan Hadid, abd al-Sittar al-Za'im (Lia, 2018).

Deklarasi Jihad IMS (Ikhwanul Muslimin Suriah)

Penyerangan dan kekerasan yang dialami oleh para petinggi rezim pada saat itu bukan menjadi urusan dari IMS, karena belum ada bukti kuat dan ditambah lagi dengan banyaknya kelompok Islam radikan yang masuk dan ingin menyerang pemerintah. Sehingga yang pemerintah lakukan saat itu dengan memblokade media dan menuduh campur tangan asing khususnya Irak sebagai dalang terhadap penyerangan yang dialami oleh pemerintah.

Namun, pada tahun 1979 terdapat 83 penyerangan yang dialami oleh kadet alawit di Sekolah Artileri Militer di Aleppo yang terperangkap dan dibunuh oleh kelompok Sunni sehingga semakin memicu akan terjadinya gelombang pembalasan kekerasan terhadap kelompok Islam Sunni dan para aliansinya. IMS memang mengutuk adanya pembantaian yang dilakukan di Aleppo namun melihat apa yang terjadi yaitu para kaum Sunni yang juga diserang maka IMS mendorong ke arah konfrontasi skala penuh rezim Baath dan akhirnya menyatakan deklarasi 'jihad' agar presiden Hafez mengundurkan diri dari kekuasaannya sekarang (Lia, 2018).

Puncaknya adalah yang terjadi pada tahun 1980, gerakan oposisi pemerintah mulai tidak dapat dihindari lagi sehingga pemerintah menembakan kota Jisr elShughour di Suriah Utara sebagai tempat pemberontak dan menewasakan puluhan orang. Serangan mulai dilakukan IMS dan sekutu untuk menggentarkan pemerintah dan ditanggapi pemerintah dengan tindakan keras dengan menangkap dan banyak serikat yang dibubarkan dan dipantau ketat oleh Partai Baath. Pada Juni 1980, suasana saat itu semakin mengerikan perlawanan yang dilakukan oleh IMS tidak main-main dengan mencoba membunuh Hafez namun berhasil tidak berhasil. Hingga pemerintah memutuskan bahwa anggota IMS dianggap sebagai pengkhianat dan harus dibunuh (Lund, 2011).

Pada tahun yang sama, sekitar 30.000 orang kaum islamis merespons pemerintah dengan kampanye pemboman di kota-kota Suriah. Hingga pada Agustus 1981, sebuah bom kembali menghantam parlemen Suriah dan pada Oktober markas Angkatan Udara juga menjadi sasaran. Serangan masih terus berlanjut hingga 29 November 1982 sebuah bom dijatuhkan di lingkungan el-Azbakiye di Damaskus, dan diarahkan ke sebuah gedung keamanan menewasakan banyak orang hingga masyarakat sipil dan anak sekolah. Targetpun tidak hanya pemerintah namun juga pendukung rezim individu, terutama Alawit Suriah (Lund, 2011).

Segalanya menjadi semakin diperburuk ketika IMS bertaruh nasib pada pemberontakan di Hama Februari 1982. IMS berhasil menguasai pusat pemerintahan selama 10 hari namun berhasil diambil alih kembali oleh pasukan Refaat Al – Assad. Pemerintah saat itu memutuskan untuk membuat contoh Hama dengan meratakan bagian-bagian kota dengan membumihanguskan Hama dengan bom yang dijatukan ke kota tersebut. Setidaknya diperkirakan total kematian di Hama mencapai 10.000 hingga 20.000 orang. Kekejaman di Hama menjadi cara untuk mematahkan punggung pemberontakan, kejadian ini pula yang menjadi titik terendah IMS dengan personil yang semakin sedikit

dan menjadi buronan rezim. Walaupun tidak di musnahkan oleh rezim pada saat itu, namun IMS mendapat pengasingan (Lund, 2011). Hingga akhirnya, rezim Hafez muncul sebagai pemenang dari konflik berkepanjangan di Suriah, walaupun disisi lain banyak kehilangan legitimasi dan secara internal tidak stabil. Peristiwa yang terjadi di era 1979-1982 yakni adanya pemberontakan serta serangan – serangan yang terjadi merupakan existential threat yang dilakukan oleh IMS untuk meruntuhkan pemerintahan Hafez. Kejadian-kejadian tersebut kemudian menyisakan bekas luka menyakitkan pada Suriah.

Pemberontakan yang terjadi menjadi ancaman tersendiri bagi rezim Hafez mengingat besar dan kuatnya peran dari IMS dalam melakukan aksinya. Maka pada awal tahun 1980-an Hafez mulai melakukan upaya dalam mengatasi pemberontakan yang terjadi. Upaya-upaya pemerintah ini akan dilihat sebagai Counter-terrorism yang dilakukan pemerintah Hafez. Di mana IMS telah ditetapkan sebagai kelompok terorisme yang sangat mengancam stabilitas rezim pada saat itu. Maka Hafez pada saat itu melakukan kampanye kontra terhadap pemberontakan IMS yang brutal dengan mengeluarkan tiga strategi, terutama menggunakan kekuatan militer dengan tujuan untuk membersihkan pemberontakan dari daerah perkotaan utama dan menahan mereka dengan pasukan yang besar. Tiga strategi Hafez tersebut, yaitu (Holliday, 2013):

1. Penempatan Selektif (Selective Deployment): Hafez bergantung pada beberapa unit yang dapat diandalkan secara politis, memasang pasukan elit semua-Alawit dengan pasukan garis untuk memaksa kesetiaan. Dalam hal ini Hafez lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan apalagi dalam menempatkan pemimpin militer dalam memerangi IMS. Rezim Hafez juga memastikan kesetiaan dari kaum Alawit dengan mengirim mereka dalam medan perang melawan IMS, hal ini terbukti dalam catatan IMS yang melihat bahwa lebih dari 92% pasukan dan pemimpin militer adalah berasal dari golongan Alawit.
2. Paramiliter (Paramilitaries): Hafez mengangkat milisi pro-rezim untuk melengkapi angkatan bersenjata. Kelompok ini yang kemudian dinamai dengan pasukan paramiliter. Paramiliter ini merupakan orang-orang partai Baath dan juga pendukung rezim yang diberikan senjata untuk melawan oposisi rezim dan tanpa diketahui oleh rezim. Maka setiap aparaturnya berhak melawan IMS bukan hanya dari kalangan militer.
3. Bersihkan dan Tahan (Clear and Hold): Hafez mengerahkan pasukan lapis baja untuk membersihkan pusat-pusat populasi besar, dengan tembakan tidak langsung jika perlu, dan menahan mereka dengan pasukan yang besar. Dalam hal ini upaya yang kemudian dilakukan oleh Hafez adalah dengan menutup setiap kota pada waktu yang sama serta menggeledah setiap rumah dan menangkap atau bahkan mengeksekusi tersangka pemberontak. Strategi ini juga yang kemudian menjadi awal pengepungan di kota Hama yang berhasil dilakukan oleh IMS dan menjadi kekalahan terbesar IMS.

Dari upaya tersebut kita dapat melihat bahwa Hafez merasa sangat terancam dengan gerakan pemberontak yang dilakukan oleh IMS sebagai dalang dibalik pemberontakan ini. Strategi yang digunakan pun dipikirkan dengan matang agar IMS mudah untuk ditaklukan. Ini dapat dikatakan sebagai bentuk counter terhadap kelompok

pemberontak yang dilakukan oleh Hafez dan dibuktikan dengan kemenangan Hafez dalam menumpas habis IMS yang ingin menjatuhkan kekuasaannya.

Dampak Bagi Ikhwanul Muslimin Di Suriah Pasca Pemberontakan

Pasca pemberontakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dan berakhirnya serangan yang dilakukan oleh pemerintah di Hama menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kemajuan dari IMS itu sendiri, misalnya:

1. **Kehilangan Banyak Anggota**
Laporan diplomatik awal dari negara-negara Barat menyatakan bahwa 10.000 orang tewas. Estimasi selanjutnya bervariasi, dengan estimasi yang lebih rendah mengklaim bahwa setidaknya 20.000 warga Suriah terbunuh. Sekitar 1.000 tentara Suriah terbunuh selama operasi, dan sebagian besar kota tua dihancurkan (Kifner, 1982). Akibatnya IMS mengalami kemunduran karena kehilangan banyak anggota setelah pengeboman di Hama tersebut.
2. **Melarikan dan Pengasingan Diri**
Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah dalam menganggapi perlawanan yang dilakukan oleh IMS. Pemerintah akan menghukum mati setiap anggota IMS karena merasa mereka adalah bagian dari pemberontak atau aksi teror.
3. **Dipenjara**
Akibat lain dari pemberontakan IMS adalah banyaknya anggota yang kemudian ditangkap dan dipenjara. Hal ini tak lain untuk menakuti dan membuat para anggota keluar dari Ikhwanul Muslimin.

Kesimpulan

Perkembangan Ikhwanul Muslimin semakin luas disertai dengan penyebarannya ke berbagai negara. Ikhwanul Muslimin yang awalnya terbentuk di Mesir telah memberikan sejarah tersendiri bagi peradaban politik dan agama yang ada di Suriah. Sejak perkembangannya ini, Ikhwanul Muslimin semakin kuat dan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap lawan-lawannya pada saat itu. Dengan demikian masuknya Ikhwanul Muslimin ke Suriah pada masa pemerintahan Hafez Al – Assad mampu mempengaruhi dan berdiri tegak menjadi oposisi untuk melawan pemerintah. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dilakukan oleh Hafez dirasa tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Maka Ikhwanul Muslimin menjadi garda terdepan dalam melawan pemerintah. Bagi Hafez sendiri, Ikhwanul Muslimin menjadi oposisi paling kuat dan tidak dapat diremehkan pengaruhnya.

Kebijakan Hafez ini berupa 4 pilar yang dinilai diskriminatif dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang dilakukan oleh Hafez yang mengangkat panglima tentara dan petinggi politik hanya dari kalangan Alawiyah saja. Di mana kaum ini merupakan kaum dari Hafez itu sendiri. Hal ini tentu saja mendapat kecaman yang kuat dari kaum lain yang merasa yang dilakukan Hafez ini tidak seharusnya seperti itu. Ditambah lagi keinginan kuat dari Hafez untuk menjadikan Suriah sebagai negara sekuler yang seharusnya tidak berpegang pada agama semata. Melihat hal ini, menambah semakin kuat Ikhwanul Muslimin untuk melawan rezim Hafez Al-Assad.

Pemberontakan-pemberontakan mulai dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, karena mereka merasa pemerintah sama sekali tidak mendengarkan suara dan aspirasi rakyat. Ikhwanul Muslimin mulai menyerang pangkalan militer dan tempat berlindung para petinggi politik dan menyebabkan kekacauan yang ada di Suriah pada saat itu. Melihat hal ini, Hafez mulai memberikan pernyataan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah pemberontak yang melakukan aksi terror dan membahayakan masyarakat sipil, sehingga perlu untuk dimusnahkan. Ada beberapa counter-terrorisme yang dilakukan oleh Hafez yang dapat kita lihat dalam 3 strategi yaitu, 1). Penempatan Selektif (*Selective Deployment*) 2). Paramiliter (*Paramilitaries*) dan 3). Bersihkan dan Tahan (*Clear and Hold*). Dari upaya-upaya inilah, Hafez mampu menaklukkan kembali Ikhwanul Muslimin dan menjadi kehancuran bagi Ikhwanul Muslimin yang menyebabkan banyak anggota yang terbunuh, keluar dan juga dipenjara.

Dengan demikian, hal inilah yang menjadi titik hancur Ikhwanul Muslimin pada saat itu. Jika dilihat kembali dinamika hubungan yang terjadi antara Ikhwanul Muslimin dan Rezim Hafez mengalami pasang surut dan terus mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari kekuatan kedua belah pihak dalam melihat pemerintahan dan politik di Suriah. Yang mana pada akhirnya Ikhwanul Muslimin harus mundur dalam pertarungan melawan pemerintah dan menyebabkan mereka harus memulai kembali Ikhwanul Muslimin di Suriah.

Referensi

- Aiqani, N. (2018). Analisis Penerimaan Gerakan Sosial Transnasional (Transnational Social Movement) Ikhwanul Muslimin Di Turki Pasca Arab Spring. Diploma Thesis. Universitas Andalas.
- Blanga, Y. U. (2017). The Role of the Muslim Brotherhood in the Syrian Civil War. Middle East Policy Council, 24.
- Chairil, C. (2014). Ikhwanul Muslimin Di Empat Masa Kepresidenan Mesir.
- Fakhry, G. M. (2015). Problematika Kekuatan Politik Islam Di Yaman, Suriah, Dan Aljazair. Jurnal Penelitian Politik, 12.
- Hamzah, J. (2013). Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam. Jurnal Sulasena, 8.
- Holliday, J. (2013). The Assad Regime From Counterinsurgency to Civil War. Middle East Security Report, 8.
- Inggita, P. (2018). Peran Ikhwanul Muslimin Suriah Dalam Bidang Sosial Agama Tahun 1945-1982. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Khaliki, A. (2012). Ikhwanul Muslimin Dan Gerakan Tarbiyah Di Banten Dan Kota Batam. Jurnal Multikultural & Multireligius, 11.
- Kifner, J. (1982) Pasukan Suriah Dikatakan Untuk Memerangi Pemberontak Yang Melingkari Di Kota Pusat. New York Times.
- Lia, B. (2018). "The Islamist Uprising in Syria , 1976 – 82 : The History and Legacy of a Failed The Islamist Uprising in Syria , 1976 – 82 : The History and Legacy of a Failed Revolt.

- Lund, A. (2011). The Ghosts Of Hama The Bitter Legacy of Syria's Failed 1979-1982 Revolution.
- Misbah, M. (2015). Kontribusi Imam Asy-Syahid Al-Banna Terhadap Pemikiran Islam Modern. Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 3.
- Rahanyamtel, H. C. (2017). Kebijakan Counter-Terrorism Jordania Menghadapi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
- Sattar, N. Al Ikhwan Al Musli" (MinSociety of Muslim Brotherhood) Aims and Ideology, Role and Impact.
- Soesilowati, S. (2011). Sekuritisasi 'Manusia Perahu': Efektifkah?. Jurnal Global Strategis.
- Yulianti, D. (2017). Perang Global Melawan Terorisme Dalam Perspektif Sekuritisasi. Jurnal ICMES.